

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I disusun sebagai bagian pendahuluan yang berfungsi memberikan landasan awal dalam memahami arah dan fokus penelitian secara menyeluruh. Bab ini terdiri atas delapan subbab yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, argumen penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok memasuki fase yang semakin intens sejak pecahnya perang dagang pada tahun 2018. Persaingan tersebut diawali dengan kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor terhadap berbagai produk asal Tiongkok, kemudian direspons oleh Tiongkok melalui kebijakan serupa. Perang dagang menjadi titik penting dalam perubahan hubungan kedua negara dari kerja sama ekonomi menuju persaingan yang lebih terbuka. Persaingan tersebut tidak lagi terbatas pada kebijakan perdagangan, tetapi berkembang ke berbagai sektor strategis seperti teknologi, keamanan, investasi, dan pengaruh ekonomi di kawasan Indo-Pasifik (Blackwill & Zelikow, 2021).

Dinamika tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kapasitas ekonomi Tiongkok yang berkembang pesat sejak reformasi ekonomi pada akhir 1970-an. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten telah mendorong Tiongkok menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia sekaligus memperluas

pengaruh politik dan strategisnya di kawasan Asia-Pasifik. Perkembangan tersebut mendorong Amerika Serikat untuk memperkuat kembali keterlibatannya di kawasan melalui kebijakan Pivot to Asia atau Rebalancing to Asia yang diumumkan pada tahun 2011. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kerja sama di bidang keamanan, ekonomi, dan diplomasi dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik (Clinton, 2011). Pada saat yang sama, Tiongkok memperluas pengaruh ekonominya melalui Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan pada tahun 2013. Program tersebut bertujuan membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan berbagai kawasan di Asia, Eropa, dan Afrika melalui jalur darat maupun jalur maritim (Hillman, 2020).

Persaingan yang semakin berkembang setelah perang dagang mendorong kedua negara memanfaatkan instrumen ekonomi sebagai sarana untuk memperkuat posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat memperkenalkan berbagai kebijakan yang bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi dan mempertahankan pengaruhnya di kawasan, sedangkan Tiongkok terus memperluas jangkauan kerja sama ekonomi melalui investasi dan pembangunan infrastruktur di berbagai negara mitra. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetisi antara kedua negara semakin bergeser ke ranah ekonomi yang menjadi salah satu arena utama dalam rivalitas kekuatan besar.

Dalam menghadapi pengaruh ekonomi Tiongkok yang semakin besar, Amerika Serikat meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperkuat posisinya di kawasan Indo-Pasifik. Asia Reassurance Initiative Act (ARIA) yang disahkan pada tahun 2018 bertujuan meningkatkan komitmen Amerika Serikat dalam kerja

sama ekonomi, diplomasi, dan pertahanan di kawasan. Selain itu, pada tahun 2022 Amerika Serikat memperkenalkan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang menekankan pada pembentukan standar perdagangan dan investasi yang transparan serta berkelanjutan. Pendekatan ini berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh Tiongkok melalui BRI yang lebih berfokus pada pembiayaan langsung proyek-proyek pembangunan infrastruktur melalui lembaga keuangan seperti China Development Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Namun demikian, model pembiayaan Tiongkok juga mendapat kritik karena dinilai berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi bagi negara penerima yang sering disebut sebagai debt trap diplomacy (Hurley et al., 2018).

Meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok membawa dampak bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Banyak negara menghadapi situasi yang kompleks karena di satu sisi memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok, sementara di sisi lain masih menjalin kerja sama strategis dengan Amerika Serikat, terutama di bidang keamanan. Kondisi tersebut mendorong negara-negara di kawasan untuk mengembangkan kebijakan luar negeri yang lebih adaptif agar tetap dapat menjaga hubungan dengan kedua kekuatan besar tanpa mengorbankan kepentingan nasional masing-masing.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam posisi strategis di tengah dinamika tersebut. Letak geografis Indonesia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta berada di sekitar jalur pelayaran internasional, seperti Selat Malaka dan Selat Lombok, menjadikan Indonesia memiliki peran penting dalam arus perdagangan global. Posisi tersebut

menempatkan Indonesia sebagai mitra yang memiliki nilai strategis bagi Amerika Serikat maupun Tiongkok (Connelly, 2021). Kondisi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama pembangunan dengan kedua negara.

Pola kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menunjukkan kecenderungan untuk berpihak secara penuh kepada salah satu kekuatan besar. Indonesia tetap menjaga kerja sama dengan kedua negara tanpa mengambil sikap yang berlawanan dengan salah satunya. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama dengan kedua negara menunjukkan upaya untuk menjaga ruang gerak dalam kebijakan luar negeri. Pola tersebut menggambarkan strategi hedging, yaitu upaya menjaga hubungan dengan dua kekuatan besar secara bersamaan untuk mengurangi risiko ketergantungan atau tekanan dari salah satu pihak, bukan bentuk balancing yang cenderung memilih satu pihak untuk melawan pihak lain.

Di sisi lain, meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut menghadirkan tantangan bagi Indonesia. Persaingan kedua negara berpotensi mempersempit ruang gerak kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Keputusan untuk menunjukkan keberpihakan secara terbuka kepada salah satu kekuatan besar dapat menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan dengan pihak lainnya serta memengaruhi upaya Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional. Situasi tersebut juga perlu dihadapi dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia.

Menghadapi kondisi tersebut, Indonesia tidak memilih untuk sepenuhnya mengikuti salah satu kekuatan besar maupun mengambil sikap konfrontatif terhadap pihak lainnya. Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui strategi hedging. Dalam kajian hubungan internasional, strategi ini dipahami sebagai upaya suatu negara untuk mempertahankan hubungan dengan dua kekuatan besar yang sedang bersaing secara bersamaan, sekaligus mengurangi berbagai risiko yang dapat muncul akibat rivalitas tersebut.

Penerapan strategi hedging terlihat melalui upaya Indonesia dalam menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok tanpa mengabaikan hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Pendekatan tersebut banyak diwujudkan melalui diplomasi ekonomi. Perkembangan rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan bahwa kompetisi kedua negara tidak hanya berlangsung pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga semakin berpusat pada penguasaan pengaruh ekonomi melalui perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan kerja sama pembangunan. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk memanfaatkan diplomasi ekonomi sebagai instrumen dalam menjaga hubungan dengan kedua negara secara bersamaan.

Praktik tersebut tercermin dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai inisiatif ekonomi yang diprakarsai oleh kedua negara. Indonesia berpartisipasi dalam sejumlah proyek yang berkaitan dengan Belt and Road Initiative (BRI) guna memperoleh dukungan pembiayaan infrastruktur serta mendorong pengembangan industri nasional. Pada saat yang sama, Indonesia juga bergabung dalam berbagai kerja sama ekonomi yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, salah

satunya melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Keterlibatan dalam kedua inisiatif tersebut menunjukkan adanya upaya Indonesia untuk memanfaatkan peluang kerja sama ekonomi dengan kedua negara tanpa harus membangun ketergantungan secara eksklusif terhadap salah satu pihak.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2024), pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor industri menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Besarnya kebutuhan pembiayaan mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama investasi dengan berbagai negara, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Dinamika rivalitas kedua negara pada akhirnya menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk memperoleh alternatif sumber pendanaan sekaligus memperluas kerja sama ekonomi yang mendukung agenda pembangunan nasional.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas strategi Indonesia dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Mubah (2019) menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan konsep double hedging strategy, yaitu dengan memanfaatkan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok melalui sinkronisasi antara Global Maritime Fulcrum dan Belt and Road Initiative, sekaligus tetap menjaga keterlibatan Amerika Serikat dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, Putri et al. (2025) melihat strategi hedging Indonesia dari perspektif konstruktivisme dengan menekankan peran identitas Indonesia sebagai negara Non-Blok dalam membentuk kebijakan luar negerinya.

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami strategi Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat dan

Tiongkok, sebagian besar masih berfokus pada aspek politik atau keamanan. Kajian yang secara khusus membahas bagaimana strategi hedging dijalankan melalui diplomasi ekonomi masih relatif terbatas. Padahal, sejak pecahnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018, persaingan antara kedua negara semakin terlihat dalam bidang ekonomi, terutama melalui investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi ekonomi digunakan oleh Indonesia sebagai salah satu cara untuk menjalankan strategi hedging dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya pada periode setelah perang dagang tahun 2018. Dengan melihat dinamika kerja sama ekonomi Indonesia dengan kedua negara tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana Indonesia menjaga kepentingan nasional dan mempertahankan otonomi kebijakannya di tengah persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan utama: "Bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik dan menyeimbangkan investasi asing langsung (FDI) dari Amerika Serikat dan Tiongkok di sektor infrastruktur dan sumber daya alam sebagai implementasi strategi *hedging* pasca perang dagang AS-Tiongkok (2018-2024) ?"

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dijalankan dalam menarik serta menyeimbangkan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) dari Amerika Serikat dan Tiongkok di sektor infrastruktur dan sumber daya alam sebagai bagian dari strategi *hedging* Indonesia setelah terjadinya perang dagang AS–Tiongkok pada periode 2018–2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mengelola hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat dan Tiongkok melalui perdagangan bilateral, kerja sama investasi, serta keterlibatan dalam forum ekonomi regional dan global.
- b. Menganalisis penerapan strategi *hedging* Indonesia dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya melalui upaya menjaga keseimbangan hubungan ekonomi dengan kedua negara.
- c. Mengidentifikasi pola investasi asing langsung dari Amerika Serikat dan Tiongkok pada sektor infrastruktur dan sumber daya alam di Indonesia selama periode 2018–2024.
- d. Menganalisis peran investasi asing tersebut terhadap kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, serta menjaga otonomi strategis Indonesia di tengah rivalitas

kekuatan besar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi mengenai diplomasi ekonomi dan strategi negara menengah dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara diplomasi ekonomi, strategi *hedging*, serta dinamika investasi internasional dalam konteks persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi diplomasi ekonomi Indonesia yang lebih seimbang dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi praktisi diplomasi, akademisi, dan pengamat hubungan internasional dalam memahami dinamika persaingan ekonomi antara kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik serta implikasinya terhadap posisi dan kepentingan strategis Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menyajikan paparan mengenai dasar teoritis dan konseptual dasar dalam penelitian ini. Bagian ini terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang diuraikan sebagai berikut

1. *Literature Review*

Topik mengenai posisi Indonesia dalam rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama dari sudut pandang strategi *hedging*, telah banyak dilakukan dan rata-rata berfokus pada sudut pandang politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Rachmadsyah (2025), melalui studi mengenai Nepal, menunjukkan bahwa strategi *hedging* dapat diimplementasikan melalui pemanfaatan kerja sama dengan dua kekuatan besar seperti Millennium Challenge Corporation (MCC) dan Belt and Road Initiative (BRI). Strategi ini memungkinkan negara memperoleh manfaat ekonomi dari kedua pihak, namun pada saat yang sama juga menimbulkan risiko ketergantungan seperti debt trap diplomacy apabila tidak dikelola secara optimal.

Sejalan dengan itu, Marston (2023) menjelaskan bahwa strategi *hedging* tidak selalu bersifat permanen dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam kondisi tertentu, negara dapat meninggalkan strategi tersebut dan beralih menuju bandwagoning, bahkan tanpa adanya ancaman keamanan eksternal yang langsung. Perubahan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti persepsi elite dan kalkulasi politik internal, dibandingkan tekanan struktural dari sistem internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan alignment negara bersifat dinamis dan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor eksternal.

Dalam konteks Indonesia, Pambudhi & Sundari (2024) menegaskan bahwa diplomasi ekonomi dengan Tiongkok berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui kerja sama ekonomi, Indonesia berupaya mendukung visi jangka panjang pembangunan nasional, termasuk Indonesia Emas

2045. Namun demikian, hubungan ekonomi tersebut tetap mengandung tantangan berupa potensi ketergantungan dan ketimpangan perdagangan, sehingga diperlukan strategi yang seimbang untuk menjaga otonomi kebijakan luar negeri Indonesia.

Pada tingkat kawasan yang lebih luas, Liu (2024) menunjukkan bahwa dinamika persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut China Selatan membentuk pola *asymmetric balancing*, di mana interaksi antara kekuatan militer, hukum internasional, dan strategi negara-negara kawasan menghasilkan tatanan regional yang bersifat hibrida. Meskipun terdapat upaya penyeimbangan melalui kehadiran Amerika Serikat dan mekanisme hukum internasional, struktur kawasan tetap didominasi oleh Tiongkok, sehingga menciptakan sistem yang tidak sepenuhnya stabil maupun sepenuhnya anarkis.

Sementara itu, Jaknanihan (2022) menjelaskan bahwa penolakan Tiongkok terhadap konsep Indo-Pasifik dipengaruhi oleh persepsi ancaman yang terbentuk dari narasi *containment* serta identitas strategis Beijing. Dengan pendekatan *realist constructivism*, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor material dan ideational bekerja secara bersamaan dalam membentuk respons Tiongkok. Alih-alih berintegrasi dalam kerangka Indo-Pasifik, Tiongkok justru mengembangkan visi regional alternatif melalui inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* (BRI).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok umumnya masih berfokus pada aspek kebijakan luar negeri secara umum, keamanan kawasan, serta pendekatan

konseptual terhadap strategi *hedging*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara lebih mendalam bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia digunakan sebagai instrumen operasional dalam menjalankan strategi *hedging* di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan menggunakan kerangka strategi *hedging* sebagai perspektif utama, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Indonesia menyeimbangkan hubungan ekonomi dengan kedua kekuatan besar melalui pola investasi asing langsung pada periode pasca perang dagang 2018 hingga 2024, sekaligus melihat implikasinya terhadap upaya Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional serta mempertahankan otonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Tabel 1.1. Tinjauan Pustaka

No	Judul dan Penulis	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Teori/ Konsep	Temuan
1.	<i>Hedging between Giants: Analisis Pilihan Kebijakan Luar Negeri Nepal dalam Menghadapi Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok (2017–2024)</i> (Azriel Muvasa Rachmadsyah, 2025)	Bagaimana strategi <i>hedging</i> Nepal dalam menghadapi MCC dan BRI di kawasan Asia Selatan pada 2017-2024?	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.	<i>Hedging</i> Strategy; Diplomasi Ekonomi; Portofolio Strategis	Nepal menerapkan <i>hedging</i> dengan memanfaatkan MCC dan BRI untuk keuntungan ekonomi, namun menghadapi risiko debt trap diplomacy jika pengelolaan investasi tidak optimal.
2.	<i>Abandoning Hedging</i> (Hunter S. Marston, 2023)	Mengapa dan dalam kondisi apa suatu negara memilih untuk meninggalkan strategi <i>hedging</i> dan beralih ke bandwagoning, meskipun tidak menghadapi ancaman keamanan eksternal yang langsung?	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif terhadap Kamboja dan Myanmar untuk menganalisis alasan kedua negara meninggalkan strategi <i>hedging</i> dan memilih lebih	<i>Hedging</i> ; Neoclassical Realism	Negara-negara Asia Tenggara memperkuat kerja sama dengan kedua pihak secara bersamaan; keputusan dipengaruhi faktor domestik dan persepsi elite, bukan hanya ancaman eksternal. <i>Hedging</i> dapat ditinggalkan meskipun tidak ada ancaman keamanan eksternal langsung. Artinya, keputusan alignment tidak selalu dipicu oleh ancaman militer atau tekanan struktural dari luar. Perubahan dari <i>hedging</i> ke bandwagoning

			dekat dengan Tiongkok		bisa didorong oleh kalkulasi politik internal, bukan hanya oleh tekanan geopolitik eksternal.
--	--	--	-----------------------	--	---

3.	Indonesia Diplomacy Strategy Towards China in National Economic Resilience and Security Perspective (Pambudhi & Sundari, 2024)	Bagaimana strategi diplomasi Indonesia–Tiongkok berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045?	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis strategi diplomasi Indonesia–Tiongkok dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.	Ketahanan Ekonomi Nasional; Diplomasi Ekonomi	Diplomasi ekonomi dengan Tiongkok memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, tetapi memerlukan strategi yang seimbang untuk menghindari risiko ketergantungan dan ketimpangan perdagangan.
----	--	--	--	---	---

4.	<p>Power and law: Asymmetric balancing between China, the US, and Southeast Asian claimants in the South China Sea and the subregional order, 2010–2021 (Liu, 2024)</p>	<p>a. Bagaimana China menggunakan kekuatannya untuk memajukan klaim teritorial dan membentuk tatanan sub-regional yang asimetris</p> <p>b. Bagaimana Amerika Serikat melakukan penetrasi kekuatan di Laut China Selatan dan memengaruhi tatanan asimetris tersebut?</p> <p>c. Bagaimana hukum internasional berkontribusi dalam penyelesaian sengketa dan memengaruhi struktur tatanan kawasan?</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus</p>	<p><i>Hedging</i>; Regional Security Complex (RSC) Theory; Asymmetry Theory</p>	<p>Tesis ini menemukan bahwa dinamika Laut China Selatan sejak 2010 membentuk model “asymmetric balancing”, di mana politik kekuatan dan hukum internasional berinteraksi menciptakan tatanan subregional hibrida, secara struktural tetap hierarkis dengan dominasi China, namun mengandung elemen anarki akibat penetrasi AS dan mekanisme legal internasional. Balancing militer dan hukum melemahkan dominasi China tetapi tidak mengubah sifat dasar sistem yang asimetris.</p>
----	---	---	---	---	--

5.	Beyond Inclusion: Explaining China's Rejection on the Indo-Pacific Regional Construct (Arrizal Anugerah Jaknanihan, 2022)	<ul style="list-style-type: none"> a) Bagaimana persepsi ancaman Tiongkok terhadap konsep Indo-Pasifik terbentuk? b) Bagaimana narasi containment dan anti-China memengaruhi sikap Beijing? c) Bagaimana identitas dan visi regional Tiongkok membentuk responsnya terhadap konstruksi Indo-Pasifik? 	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.	<i>Hedging</i> ; Realist Constructivism	Penelitian ini menemukan bahwa penolakan Tiongkok terhadap konsep Indo-Pasifik didorong oleh persepsi ancaman yang terbentuk dari narasi containment dan identitas strategis Beijing. Dengan pendekatan realist constructivism, studi ini menunjukkan bahwa faktor ideasional dan material sama-sama berperan, serta bahwa China merespons bukan dengan mencari inklusi, tetapi dengan mempromosikan visi regional alternatif melalui BRI dan konsep-konsep strategisnya sendiri.
----	---	---	---	---	---

6.	Diplomasi Ekonomi Indonesia di Tengah Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok: Strategi Navigasi di Kawasan Indo-Pasifik”	Bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik dan menyeimbangkan investasi asing langsung (FDI) dari Amerika Serikat dan Tiongkok di sektor infrastruktur dan sumber daya alam sebagai implementasi strategi <i>hedging</i> pasca perang dagang AS-Tiongkok (2018-2024)?	Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus	<i>Hedging Strategy</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dijalankan dalam menarik serta menyeimbangkan investasi asing langsung (<i>Foreign Direct Investment</i> /FDI) dari Amerika Serikat dan Tiongkok di sektor infrastruktur dan sumber daya alam sebagai bagian dari strategi <i>hedging</i> Indonesia setelah terjadinya perang dagang AS-Tiongkok pada periode 2018–2024.
----	--	---	--	-------------------------	---

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun melalui kerangka strategi hedging dan konsep diplomasi ekonomi untuk melihat bagaimana Indonesia menghadapi rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.

a. Expanded Balance of Power Theory

Penelitian ini menggunakan Expanded Balance of Power Theory sebagai dasar untuk menganalisis rumusan masalah. Teori Balance of Power merupakan salah satu teori utama dalam kajian hubungan internasional yang menjelaskan bagaimana negara berupaya mencegah dominasi kekuatan tertentu dalam sistem internasional. Dalam perkembangannya, teori ini tidak hanya dipahami dalam bentuk keseimbangan kekuatan militer (hard balancing), tetapi juga mengalami perluasan melalui konsep Expanded Balance of Power. Pendekatan ini menekankan bahwa negara dapat menggunakan berbagai instrumen di luar kekuatan militer, seperti diplomasi, kerja sama ekonomi, dan institusi internasional, untuk merespons ancaman atau ketimpangan kekuatan dalam sistem internasional.

Perkembangan tersebut kemudian melahirkan gagasan soft balancing yang diperkenalkan oleh beberapa sarjana seperti T.V. Paul (2005, 2018), Robert A. Pape (2005), serta Stephen Brooks dan William Wohlforth (2005). Gagasan ini menjelaskan bahwa negara tidak selalu memilih aliansi militer secara langsung, tetapi dapat menggunakan instrumen non-militer untuk membatasi atau mengimbangi pengaruh kekuatan besar. Pendekatan ini memberikan ruang bagi negara untuk tetap mempertahankan fleksibilitas dalam kebijakan luar

negeri sambil tetap menjaga kepentingan keamanan mereka. Perluasan teori keseimbangan kekuatan ini membantu menjelaskan dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks, di mana negara tidak selalu berada dalam posisi blok yang kaku, melainkan lebih fleksibel dalam merespons perubahan struktur kekuatan global.

b. Konsep *Hedging*

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan konsep *hedging*. Dalam hubungan internasional, *hedging* dipahami sebagai strategi negara untuk menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian dengan cara menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan besar dan menghindari ketergantungan pada satu negara saja. Menurut Kuik (2016), *hedging* bukan berarti negara bersikap netral, tetapi lebih kepada upaya mencari keuntungan dari berbagai pihak sambil mengurangi risiko yang mungkin muncul dari persaingan antar negara besar.

Konsep *hedging* berkembang seiring meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam perkembangannya, strategi *hedging* tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, politik, dan diplomatik. Literatur mengenai *hedging* mengidentifikasi beberapa bentuk strategi, antara lain pragmatisme ekonomi (*economic hedging*), penolakan dominasi (*political and institutional hedging*), penyeimbangan lunak dan modernisasi militer (*military/soft balancing*), serta ambiguitas strategis (*strategic ambiguity*) (Husna, 2025). Dari berbagai bentuk tersebut, penelitian ini berfokus pada pragmatisme ekonomi yang menekankan upaya negara untuk

memperoleh manfaat ekonomi melalui kerja sama dengan berbagai mitra sekaligus mengurangi risiko yang muncul akibat ketergantungan yang berlebihan pada satu negara. Dalam praktiknya, strategi ini mendorong negara untuk memperluas hubungan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak guna menjaga fleksibilitas dan otonomi dalam kebijakan luar negerinya.

Dalam penelitian ini, strategi hedging Indonesia dianalisis menggunakan kerangka Kuik (2016) yang menjelaskan hedging sebagai upaya negara untuk menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan besar secara bersamaan tanpa melakukan keberpihakan secara eksklusif. Kerangka ini digunakan melalui beberapa indikator, yaitu diversifikasi mitra ekonomi yang menunjukkan penyebaran kerja sama dan investasi dengan berbagai negara; keterlibatan dengan kekuatan yang bersaing yang terlihat dari hubungan simultan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok; tidak membentuk aliansi eksklusif yang ditunjukkan melalui keterlibatan dalam berbagai kerja sama tanpa terikat blok tertentu; pemanfaatan institusi regional dan multilateral seperti ASEAN; manajemen risiko ketergantungan melalui penyebaran investasi lintas negara dan sektor; serta otonomi kebijakan yang menunjukkan bahwa keputusan kerja sama ekonomi tetap berlandaskan kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi sebagai instrumen yang digunakan dalam menjalin hubungan internasional.

c. Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrumen utama dalam hubungan

internasional yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui interaksi dengan negara lain. Diplomasi tidak hanya terbatas pada aktivitas politik antar pemerintah, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan untuk menjaga hubungan antarnegara tetap stabil.

Dalam perkembangannya, diplomasi memiliki beberapa bentuk, seperti diplomasi politik yang berfokus pada negosiasi antarnegara, diplomasi keamanan yang berkaitan dengan kerja sama pertahanan, serta diplomasi ekonomi yang menitikberatkan pada aspek kerja sama ekonomi antarnegara. Di antara berbagai bentuk diplomasi tersebut, diplomasi ekonomi menjadi salah satu instrumen yang semakin penting dalam hubungan internasional kontemporer, terutama dalam konteks meningkatnya keterkaitan ekonomi global. Peran ekonomi dalam politik internasional membuat negara tidak hanya bergantung pada pendekatan politik dan keamanan, tetapi juga memanfaatkan instrumen ekonomi untuk memperkuat posisi dan kepentingannya dalam sistem internasional. Penelitian ini memilih diplomasi ekonomi sebagai kerangka pemikiran karena persaingan antarnegara saat ini tidak hanya terjadi dalam bidang politik dan keamanan, tetapi juga ekonomi. Negara cenderung menggunakan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi untuk menjaga kepentingannya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu negara tertentu. Melalui diplomasi ekonomi, negara dapat tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak tanpa harus terlalu berpihak pada satu kekuatan besar.

d. Diplomasi Ekonomi

Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi sebagai instrumen yang melekat pada suatu negara saat melakukan hedging. Diplomasi ekonomi dipahami sebagai upaya negara mencapai kepentingan nasional melalui kerja sama ekonomi, seperti perdagangan, investasi, promosi ekspor, dan bantuan pembangunan (Bayne dan Woolcock, 2016). Lebih lanjut, Marston (2023) menjelaskan bahwa diplomasi digunakan untuk menjalankan hedging secara hati-hati melalui pengelolaan aliansi politik dan keterlibatan aktif dalam forum internasional. Sementara itu, Dewantara et al. (2019) menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi semakin penting karena kekuatan ekonomi memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional.

Diplomasi ekonomi dipilih dalam penelitian ini karena paling sesuai untuk menjelaskan fokus penelitian, yaitu hubungan ekonomi negara di tengah persaingan kekuatan besar. Dibandingkan diplomasi politik atau keamanan, diplomasi ekonomi lebih dapat menunjukkan bagaimana negara menjaga keseimbangan kepentingan melalui kerja sama perdagangan dan investasi. Dengan kata lain, negara tidak hanya menjaga hubungan politik, tetapi juga berusaha membangun kerja sama ekonomi dengan banyak pihak agar tidak terlalu bergantung pada satu negara saja.

Dalam penelitian ini, diplomasi ekonomi kemudian dikaitkan dengan bentuk investasi. Dalam praktiknya, investasi menjadi salah satu instrumen yang digunakan negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi, memperluas akses pasar, serta mendukung pembangunan di negara tujuan investasi.

e. Investasi dalam Hubungan Internasional

Investasi merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi antarnegara yang memiliki peran penting dalam hubungan internasional kontemporer. Investasi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan hubungan politik dan tingkat kepercayaan antara negara. Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok menempatkan negara-negara berkembang pada situasi yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini mendorong negara untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan, tetapi juga kepentingan ekonomi dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Dalam situasi seperti ini, negara cenderung mengambil posisi yang tidak sepenuhnya berpihak, melainkan berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan yang ada (Kuik, 2026).

Upaya menjaga keseimbangan tersebut tercermin dalam meningkatnya peran investasi sebagai bagian dari hubungan ekonomi antarnegara. Instrumen investasi menjadi semakin penting karena memberikan ruang bagi negara untuk tetap menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa harus terikat secara politik. Arus investasi internasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh stabilitas politik, hubungan diplomatik, dan kepentingan strategis antara negara yang terlibat (Zaza et al., 2025).

Foreign Direct Investment (FDI). FDI dipahami sebagai investasi jangka panjang yang dilakukan pihak asing di suatu negara. FDI digunakan dalam penelitian ini karena dapat menunjukkan bagaimana negara menjalankan diplomasi ekonomi dan strategi hedging secara nyata, yaitu dengan menarik

investasi dari berbagai negara untuk menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi dan politik. Dengan adanya diversifikasi sumber investasi, negara memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan besar tertentu.

f. Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment)

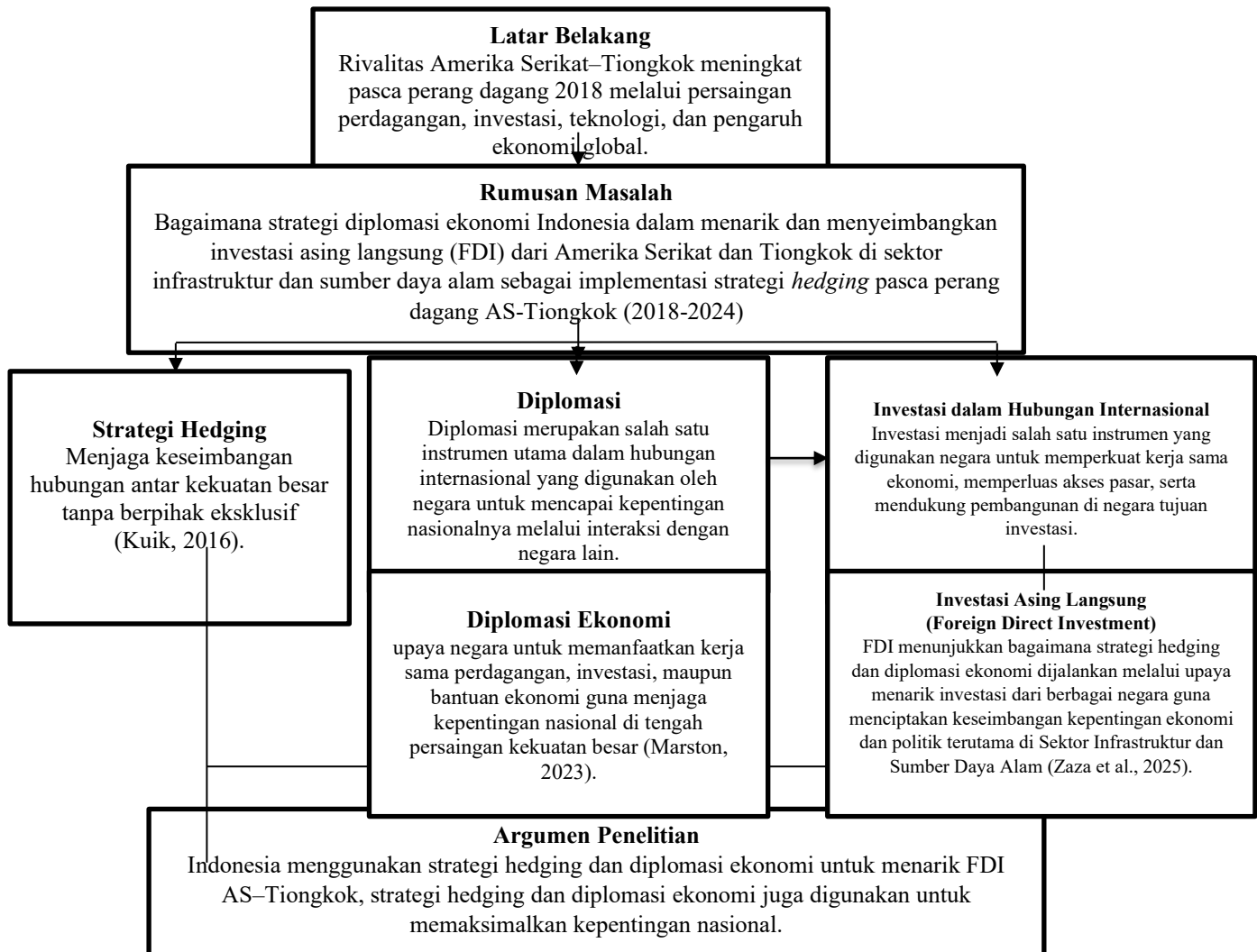
Foreign Direct Investment (FDI) merupakan bentuk investasi lintas negara di mana perusahaan atau investor dari suatu negara menanamkan modal secara langsung di negara lain dengan tujuan memperoleh kepemilikan atau pengaruh signifikan terhadap kegiatan ekonomi di negara tujuan (Riesvandha, 2025). Dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya, FDI memiliki karakteristik jangka panjang karena melibatkan komitmen modal, pembangunan fasilitas produksi, serta keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi di negara tujuan.

Karakteristik tersebut menjadikan FDI lebih relevan dalam melihat dinamika hubungan internasional yang dipengaruhi oleh rivalitas kekuatan besar. Keputusan suatu negara untuk menarik atau menerima investasi asing tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas politik, hubungan bilateral, dan kepentingan strategis tertentu (Gao, Ren, & Guo, 2023). Oleh karena itu, FDI sering digunakan sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi ekonomi untuk memperkuat hubungan dengan negara mitra sekaligus menjaga fleksibilitas kebijakan luar negeri.

Dalam penelitian ini, FDI difokuskan pada sektor infrastruktur dan sumber daya alam karena kedua sektor tersebut memiliki peran strategis dalam

pembangunan ekonomi nasional. Pada sektor infrastruktur, investasi mencakup pembangunan transportasi, energi, dan kawasan industri. Sementara itu, pada sektor sumber daya alam, investasi mencakup kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya strategis seperti mineral, energi, dan pertambangan. Kedua sektor ini dipilih karena memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional serta menjadi sektor yang paling banyak melibatkan investasi asing dalam kerja sama jangka panjang antara negara berkembang dan kekuatan ekonomi besar.

Gambar 1. 1 Gambar Kerangka Berpikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Bagian ini menjelaskan operasionalisasi konsep utama yang digunakan dalam penelitian untuk memperjelas batasan dan cara pengukuran istilah kunci. Berikut merupakan definisi konseptual serta definisi operasional yang dijadikan landasan dalam penelitian:

Definisi Konseptual

a. Strategi Hedging

Strategi hedging merupakan konsep dalam studi hubungan internasional yang menggambarkan pendekatan kebijakan luar negeri yang berada di antara dua pilihan ekstrem, yaitu balancing dan bandwagoning (Kuik, 2016). Dalam strategi ini, suatu negara tidak sepenuhnya memihak salah satu kekuatan besar, tetapi juga tidak secara terbuka menentang kekuatan tersebut. Sebaliknya, negara berupaya mempertahankan hubungan yang baik dengan berbagai aktor internasional sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin muncul akibat rivalitas antar kekuatan besar.

b. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu bentuk praktik diplomasi yang memanfaatkan instrumen ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara (Bayne dan Woolcock, 2016). Diplomasi ekonomi dalam penelitian ini dipahami sebagai penggunaan instrumen ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan kerja sama pembangunan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasional serta memperkuat posisi dalam hubungan internasional.

2. Definisi Operasional

a. Strategi Hedging Indonesia

Strategi hedging Indonesia dianalisis dengan mengacu pada lima opsi hedging yang dikemukakan oleh Kuik (2016). Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa secara eksklusif berpihak pada salah satu pihak. Indikatornya mencakup diversifikasi hubungan ekonomi dan politik, penghindaran aliansi eksklusif, keterlibatan dalam berbagai forum internasional, manajemen risiko hubungan bilateral, serta penggunaan mekanisme kelembagaan regional untuk menjaga stabilitas hubungan internasional.

b. Diplomasi Ekonomi Indonesia

Dalam penelitian ini, diplomasi ekonomi Indonesia dioperasionalkan melalui tiga aspek utama. Pertama, kebijakan perdagangan bilateral yang dilihat dari volume dan nilai ekspor-impor Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok selama periode 2018–2024 serta perjanjian perdagangan yang ditandatangani. Kedua, strategi investasi yang tercermin dari realisasi investasi asing langsung di sektor infrastruktur dan sumber daya alam. Ketiga, koordinasi kelembagaan yang melibatkan peran berbagai institusi pemerintah dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi.

c. Investasi di Sektor Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Konsep investasi dalam penelitian ini difokuskan pada investasi asing di sektor infrastruktur dan sumber daya alam. Pada sektor infrastruktur, indikator yang dianalisis mencakup proyek transportasi seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung, pembangunan energi seperti PLTU dan PLTS, serta pengembangan kawasan

industri seperti Morowali dan Weda Bay. Sementara itu, pada sektor sumber daya alam, analisis difokuskan pada investasi di industri nikel, pembangunan smelter, pengembangan baterai kendaraan listrik, serta investasi di sektor migas dan pertambangan.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa Indonesia sebagai negara menengah dengan posisi strategis dalam jalur perdagangan dan investasi global memiliki peluang untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya di tengah meningkatnya rivalitas ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan kedua negara, terutama sejak terjadinya perang dagang pada tahun 2018, tidak hanya mempengaruhi dinamika perdagangan internasional tetapi juga menggeser pola aliran investasi global. Dalam situasi tersebut, Indonesia berupaya memanfaatkan peluang yang muncul melalui penerapan diplomasi ekonomi yang bertujuan menarik arus investasi asing sekaligus menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut.

Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan berbagai forum kerja sama regional dan internasional untuk memperkuat posisi diplomasi ekonominya. Keterlibatan aktif dalam forum seperti ASEAN, RCEP, dan G20 memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama ekonomi sekaligus menjaga stabilitas hubungan dengan berbagai mitra strategis. Melalui pendekatan ini, Indonesia berupaya mengubah dinamika persaingan global menjadi peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tawar nasional. Dengan demikian, diplomasi ekonomi tidak hanya menjadi instrumen untuk menarik investasi asing,

tetapi juga menjadi bagian dari strategi yang lebih luas di tengah kompetisi geopolitik dan geoekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan motivasi para aktor secara menyeluruh, sehingga fenomena kompleks dapat dianalisis secara holistik.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Menurut Sugiyono (2023) penelitian deskriptif analitis adalah metode untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian secara objektif, sistematis, dan faktual mengenai objek penelitian (individu, situasi, atau fenomena) tanpa bermaksud generalisasi atau kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah konteks institusional dan dokumen resmi yang relevan (Bungin dalam Rahmadi, 2011). termasuk Kementerian Luar Negeri, BKPM, laporan lembaga internasional, dan publikasi akademik. Data dikumpulkan melalui desk research yang mendukung pemahaman mengenai dinamika diplomasi ekonomi Indonesia di Indo-Pasifik.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah batasan penelitian di mana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal, atau orang untuk melekatnya variabel

penelitian (Arikunto, 2010). Subjek penelitian ini terdiri atas diplomat aktif maupun mantan pejabat Kemenlu/BKPM, akademisi, peneliti Hubungan Internasional, serta pengamat kebijakan dan investasi asing. Subjek ini memberikan informasi terkait strategi diplomasi ekonomi, praktik *hedging*, dan pengaruh rivalitas AS–Tiongkok.

4. Jenis Data

Jenis data menurut Sugiono (2023) terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer melalui wawancara mendalam dengan narasumber berpengalaman, serta data sekunder berupa dokumen resmi, laporan lembaga internasional, jurnal, buku, dan publikasi berita terkait diplomasi ekonomi dan persaingan global.

5. Sumber Data

Sumber primer diperoleh langsung dari wawancara narasumber, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, publikasi lembaga internasional, jurnal ilmiah, dan artikel media massa. Kombinasi kedua sumber ini memperkaya analisis penelitian (Nurpita et al., 2025).

6. Teknik Pengumpulan Data

Creswell (2019) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan aktivitas mengumpulkan data untuk memahami makna sosial atau kemanusiaan dari individu/sekelompok orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka untuk menggali persepsi aktor, studi kepustakaan untuk memahami teori dan konsep, serta analisis dokumen

resmi dan publikasi global yang relevan. Pendekatan ini memastikan data yang diperoleh valid dan komprehensif.

7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menggunakan pendekatan tematik, meliputi reduksi data, penyajian narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan. Interpretasi mempertimbangkan konteks geopolitik Indo-Pasifik dan teori diplomasi ekonomi, sehingga strategi *hedging* dan keputusan kebijakan dapat dipahami secara menyeluruh (Miles et al., 2014).

8. Kualitas Data

Kualitas data dijaga melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas menjamin temuan mencerminkan realitas; transferabilitas menunjukkan temuan dapat diterapkan di konteks serupa; dependabilitas menekankan konsistensi; dan konfirmabilitas memastikan data bebas bias peneliti (Lincoln & Guba, 1985).